

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Komisi Informasi Publik

##### 1. Sejarah Komisi Informasi Publik

Dengan bergulirnya reformasi tahun 1998 dengan ditandai mundurnya Presiden RI saat itu Soeharto, maka demokrasi dan kebebasan pers mulai dibuka perlahan lahan namun pasti, dan tak luput dari itu semua termasuk didalamnya tentang keterbukaan informasi. Agar keterbukaan informasi semakin transparan maka dibuatlah peraturan atau regulasi yang memayungi urusan tersebut, yaitu dengan dibahasnya tentang undang undang keterbukaan informasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Presiden.

Undang undang keterbukaan Informasi awalnya bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP). Undang undang keterbukaan informasi publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004. Undang undang keterbukaan informasi publik dibahas sejak tahun 1999, setelah melewati proses selama sembilan tahun, karena tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008., setelah itu diberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu dua tahun untuk melaksanakan undang undang ini. Pada tanggal 30 April 2010, undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik efektif diberlakukan di seluruh Indonesia.

Komisi informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi.

a. Kedudukan

Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/ Kota sedangkan pusat berkedudukan di ibu kota negara.

b. Susunan

Susunan keanggotaan komisi informasi pusat berjumlah 7 ( tujuh ) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, dan komisi informasi pada tingkat daerah komisi informasi Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 5 ( lima ) orang. keanggotaan mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota dipilih oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komisioner komisi informasi yang bersangkutan dan dapat dilakukan melalui pemungutan suara anggota.<sup>17</sup>

2. Visi Misi dari Komisi Informasi Publik

a. Visi Komisi Informasi :

Sebagai lembaga mandiri, kredibel, dan menjadi ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel serta masyarakat informasi yang partisipatif

Visi tersebut bisa dijabarkan arti katanya menjadi:

Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik.

Ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif. Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

b. Misi Komisi Informasi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> . Pasal 23 - 25, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel.
- 2) Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
- 3) Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
- 5) Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

#### c. Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Komisi Informasi Publik

##### 1) Fungsi

Berfungsi menjalankan undang undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi.

##### 2) Tugas

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

3) Wewenang

Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, mengambil sumpah setiap saksi saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja.<sup>18</sup>

Komisi informasi merupakan lembaga negara independen yang mana berkedudukan di ibukota negara yang mana disebut dengan komisi informasi pusat, sedangkan komisi informasi yang di daerah Provinsi, berkedudukan di ibukota Provinsi, dan dapat

---

<sup>18</sup> . Pasal 26 dan 27, *Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula dibentuk komisi informasi Kabupaten / Kota apabila dibutuhkan.

Komisi informasi pusat meliputi memiliki kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat Provinsi dan/ atau Badan publik tingkat Kabupaten/Kota selama komisi informasi di Provinsi atau komisi informasi Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk. Sedangkan kewenangan komisi informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi yang bersangkutan yang membawahi Kabupaten / Kota di wilayah hukumnya. Kewenangan komisi informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisioner Komisi Informasi Publik
  - 1) Pengangkatan

Adapun untuk diangkat menjadi komisioner komisi informasi publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Memiliki integritas dan tidak tercela
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 ( lima ) tahun atau lebih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik
- e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik
- f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi
- g. Bersedia bekerja penuh waktu
- h. Berusia paling rendah 35 ( tiga puluh lima ) tahun
- i. Sehat jiwa raga

Perekrutmen calon anggota komisi informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif, daftar calon anggota komisi informasi wajib diumumkan kepada masyarakat, setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota komisi informasi dengan disertai dengan alasan, calon anggota komisi informasi pusat hasil rekrutmen diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) oleh Presiden sejumlah 21 ( dua puluh satu ) orang calon, kemudian dewan memilih melalui uji kepatutan dan kelayakan, kemudian anggota yang dipilih ditetapkan oleh Presiden, ini untuk komisi informasi pusat yang berkedudukan di ibukota negara Jakarta

Untuk calon komisisoner komisi informasi Provinsi dan / atau komisi informasi Kabupaten / Kota diajukan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi / atau Dewan Perwakilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Derah (DPRD) Kabupaten / Kota oleh Gubernur dan atau /Bupati /Walikotapaling sedikit 10 ( sepuluh ) orang calondan paling banyak 15 ( lima belas ) orang calon, kemudian dewan memilih melalui uji kepatutan dan kelayakan , setelah dipilih ditetapkan oleh Gubernur untuk komisioner komisi informasi Provinsi dan oleh Bupati / atau Walikota untuk komsioner komisi informasi Kabupaten / atau Kota.

Anggota komisi informasi diangkat untuk masa jabatan 4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu priode berikutnya

#### 2) Pemberhentian

Pemberhentian anggota komisi informasi dilakukan berdasarkan keputusan komisi informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk komisi informasi pusat, kepada Gubernur untuk komisi informasi Provinsi dan kepada Bupati / Walikota untuk komisi informasi Kabupaten / Kota untuk ditetapkan,

Anggota komisi informasi berhenti atau diberhentikan karena :

- a) Meninggal dunia
- b) Telah habis masa jabatannya
- c) Mengundurkan diri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 ( lima ) tahun berturut turut
- e) Melakukan tindakan tercela dan / atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh komisi informasi

Pemberhentian sebagai mana yang dimaksud diatas, ditetapkan melalui keputusan Presiden untuk komisi informasi pusat, melalui keputusan Gubernur untuk komisi informasi Provinsi, dan / atau keputusan Bupati / atau Walikota untuk komisi informasi Kabupaten / Kota. Adapun pergantian antar waktu anggota komisi informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk komisi informasi pusat, dan oleh Gubernur dengan berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi untuk komisi informasi Provinsi, dan oleh Bupati / Walikota dengan berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota, dan anggota komisi informasi pengganti antar waktu diambil dari urutan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota komisi informasi pada priode dimaksud<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> . Pasal 31 – 34, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Komisi informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan komisi yang dibentuk karena amanah undang undang nomor 13 tahun 2013 tentang keterbukaan informasi publik, yang mana komisi ini merupakan komisi informasi Provinsi yang ke 26 di Indonesia yang mana mengamanahkan dibentuknya sebuah komisi di daerah, menindak lanjuti amanah undang undang tersebut pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun sebuah panitia yang ditugaskan untuk menerima pendaftaran komisioner yang berada di sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian menerima dan menyerahkan nama nama calon Komisioner kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat , setelah melalui proses yang cukup panjang dan juga telah melalui uji proses untuk diuji kepatutan dan kelayakan ( *Feat and Proper Test* ), kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi memilih 5 nama dari daftar yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat melantik 5 ( lima ) orang komisioner komisi informasi Provinsi Sumatera Barat di gubernuran pada tanggal 4 September 2014 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk masa bakti / priode 2014 -2018. Adapun nama nama komisioner yang dilantik menjadi komisioner komisi informasi Provinsi Sumatera Barat yang pertama / priode yang pertama dan untuk masa bakti tahun 2014 -2018 adalah sebagai berikut :

TABEL II.1  
DAFTAR TABEL KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI  
SUMATERA BARAT UNTUK MASA BAKTI / PRIODE YANG  
PERTAMA 2014 -2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA KOMISIONER	JABATAN
1	Syamsu Rizal, S.E	Ketua Merangkap Anggota
2	Arfitriati, S.Ag.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Andrian Tuswandi, S.H.	Anggota
4	Yurnaldi, S.Pd.	Anggota
5	Sondri, S.E.	Anggota

*Sumber data diperoleh dari panitera pengganti di komisi informasi Provinsi Sumatera Barat*

Sebelum menempati kantor di jalan Sawo Purus V Kota Padang, komisi ini pernah menumpang kantor di salah satu ruangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berada di jalan Raden Saleh Kota Padang, namun pada tahun 2016 komisi ini pindah kantor ke jalan Sawo nomor 5 ( lima ) Purus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

#### 1. Visi Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat

Menjadi lembaga mandiri, kredibel, profesional dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Barat.

Mandiri, berarti komisi informasi Provinsi Sumatera Barat bersikap independen serta menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan memegang teguh kode etik dan tata tertib komisi informasi.

Kredibel, berarti komisi informasi Provinsi Sumatera Barat dipercaya oleh publik dan badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profesional, berarti komisi informasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas dan wewenang komisi informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, berarti komisi informasi Sumatera Barat secara efektif aktif mendorong badan publik di Sumatera Barat menerapkan undang undang keterbukaan informasi publik dan melakukan edukasi serta sosialisais kepada masyarakat Sumatera Barat agar memahami dan memanfaatkan hak memperoleh informasi publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, berarti komisi informasi memberikan dorongan melalui kegiatan penilaian, sosialisasi dan edukasi kepada badan publik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

**2. Misi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

- a. Mengembangkan system pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik di Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Mengembangkan kelembagaan yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan badan publik dan kelompok warga strategis melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas penerapan undang undang keterbukaan informasi publik oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan publik dan peningkatan kualitas pemanfaatan hak memperoleh informasi publik dan warga.

- d. Mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas serta peningkatan sumber daya manusia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi ( PPID ) pada badan publik melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring pada badan publik.
- e. Optimalisasi Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik.<sup>20</sup>

Adapun jumlah pegawai yang berada di Kantor Komisi Informasi Publik

Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Berikut :

TABEL II.2  
DAFTAR TABEL JUMLAH PEGAWAI

JENIS JABATAN	JUMLAH
Sekretaris / Panitera	1
Panitera Pengganti	1
Staf	2

*Sumber panitera pengganti komisi informasi Provinsi Sumatera Barat*

Adapun tugas dan wewenang dari komisi informasi Provinsi Sumatera

Barat adalah sebagai berikut :

Ketua komisioner merangkap anggota :

1. Mewakili lembaga secara resmi baik ke dalam maupun keluar
2. Memimpin lembaga secara resmi
3. Mengkoordinasikan secara kolektif kolegial dalam rumusan kebijakan internal dan eksternal

<sup>20</sup>. Memahami Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat, ( Padang : Semen Padang Press, 2016 ), h. xiv-xv

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menetapkan majelis komisioner dalam persidangan sengketa keterbukaan informasi melalui adjudikasi non litigasi
5. Memimpin pertemuan / rapat rapat

Wakil ketua Komisioner merangkap anggota :

1. Mewakili ketua apabila berhalangan, baik kedalam maupun keluar
2. Mengkoordinasikan lebih jauh dan lanjut dalam urusan internal
3. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan kelembagaan secara kolektif dan kolegal
4. Mewakili ketua dalam menetapkan majelis komisioner yang akan menyidangkan perkara keterbukaan informasi apabila ketua berhalangan

Komisioner anggota bidang Penyelesaian Sengketa :

1. Menetapkan lebih jauh tentang teknis dalam proses penyelesaian sengketa informasi
2. Koordinasi kedalam secara kolektif kolegal dalam hal urusan penyelesaian sengketa informasi
3. Merekap jumlah kasus dan jalannya persidangan dengan dibantu oleh panitera pengganti dan staf

Komisioner anggota bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi :

1. Merumuskan agenda sosialisasi tentang komisi informasi secara kolektif kolegal
2. Menetapkan tempat dan waktu sosialisasi secara kolektif kolegal
3. Memberi peringkat kepada lembaga publik dalam hal keterbukaan informasi secara kolektif kolegal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Komisioner anggota bidang kelembagaan :

1. Megurusi dan menertib ushakan tata usaha dan kesekretariatan di komisi informasi secara kolektif kolegal dan dibantu oleh staf
2. Mengsingkronkan dan mengharmonisasikan lembaga secara internal maupun eksternal secara kolektif kolegal
3. Menjalin kerja sama kelembagaan dengan instansi vertikal di daerah maupun dinas dinas di daerah
4. Pengembangan kelembagaan secara kolektif kolegal<sup>21</sup>

Sekretariat / panitera :

1. Memimpin kesekretariatan
2. Menertib usahakan tata usaha di komisi informasi
3. Mengelola urusan keuangan
4. Menetapkan panitera pengganti
5. Membantu komisioner dalam hal urusan kesekretariatan dan administrasi dan oprasional

Panitera pengganti :

1. Menerima pendaftaran sengketa keterbukaan informasi
2. Memeriksa berkas kelengkapan syarat sengketa keterbukaan informasi
3. Meregistrasi perkara yang masuk ke komisi informasi
4. Menetapkan jadwal persidangan

---

<sup>21</sup>. Syamsu Rizal ,Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara, Padang, 20 April 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memanggil para pihak dengan *relas* yang patut dan wajar dalam rangka untuk mengikuti jalannya persidangan
6. Mengikuti jalannya persidangan
7. Menjadi panitera pengganti dalam persidangan
8. Membuat / mengetik putusan sidang<sup>22</sup>

#### Staf :

1. Membantu komisioner dan sekretaris dalam hal urusan tertib administrasi dan ketatausahaan dan urusan operasional sehari-hari dalam kelancaran operasional
2. Membantu sekretaris dalam hal surat menyurat dalam hal urusan administrasi dan kesekretariatan
3. Membantu sekretaris dalam hal urusan tata kelola keuangan
4. Membantu Komisioner dalam hal persidangan yang dianggap perlu dan dibutuhkan
5. Membantu panitera pengganti dalam urusan persiapan persidangan

---

<sup>22</sup> . Ade Faulina, Panitera Pengganti pada Komisi Informasi Sumatera Barat, *Wawancara* Padang 20 April 2018